

BABI

PENDAHULUAN

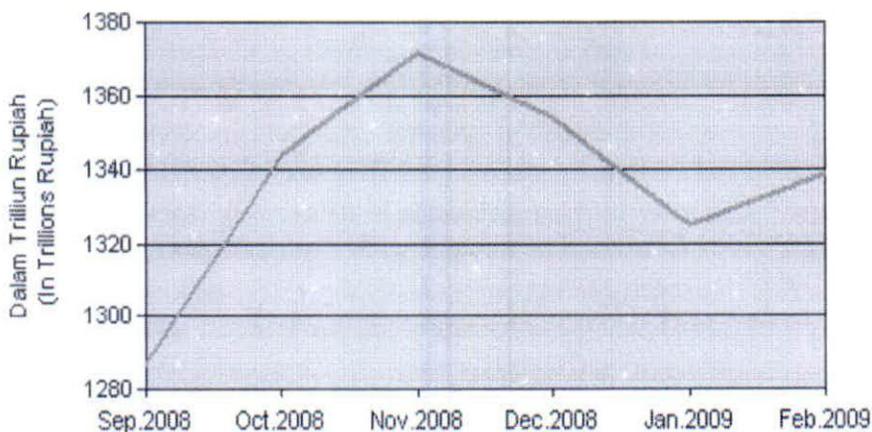
A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak - pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit (Undang – Undang RI No.10 Tahun 1998, Kasmir 2008).

Perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal (Kiryanto, 2007). Krisis Moneter 1997 - 1998 yang melanda perekonomian Indonesia telah berimbas pada sektor perbankan. Krisis yang diawali dengan devaluasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS telah menimbulkan ledakan kredit macet dan melunturkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, yang pada gilirannya melemahkan fungsi intermediasi perbankan. Masyarakat kala itu banyak menarik dananya (*rush*) yang ada di bank swasta dan mengalihkannya ke bank yang dianggap aman (*flight to safety*), yakni bank asing dan bank BUMN. Untuk mencegah hal ini bank – bank mematok suku bunga dananya dengan sangat tinggi yang diikuti dengan penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

perbankan praktis terhenti karena sektor riil tidak mampu menyerap dana yang mahal harganya.

Demikian pula perlambatan perekonomian Indonesia yang dilatarbelakangi oleh Krisis Finansial Global 2008 - 2009, telah berimbas pada penurunan ekspansi kredit perbankan. Sempat terjadi penurunan kredit pada periode Desember 2008 hingga Januari 2009. Besaran kredit yang semula mencapai angka 1.371,90 Triliun Rupiah pada bulan November 2008, mengalami penurunan pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 berturut - turut menjadi 1.353,60 Triliun Rupiah dan 1.325,30 Triliun Rupiah (dapat dilihat pada gambar 1.1). Hal ini berdampak pada kurang bergairahnya roda perekonomian nasional.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.1 Penurunan Kredit Perbankan Periode Desember 2008 - Januari 2009

Kegiatan utama bank itu sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan sumber dana terbesar bagi bank untuk membiayai aktivitas atau kegiatan bank

dan ini menjadi modal bank untuk melakukan aktivitas penyaluran kredit

Kredit merupakan alokasi dana terbesar bagi bank yang bisa memberi peluang keuntungan terbesar pula bagi bank. Namun demikian risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Oleh karena itu bank harus berhati-hati dalam menempatkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80 persen – 90 persen dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70 persen sampai 80 persen dari total aktiva bank. Meskipun kredit memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, namun dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa disalurkan oleh bank secara optimal dan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan (Menurut Lukman Dendawijaya, 2005).

Pertumbuhan kredit di Indonesia menunjukkan hasil yang positif selama tahun 2010 sampai 2012, artinya pertumbuhan kredit mengalami peningkatan dan masih memberikan pengaruh baik terhadap perekonomian yang masih dalam konteks fungsi intermediasi perbankan. Hal ini menunjukkan peningkatan penyaluran kredit di tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit di tahun 2010. Namun, selama tahun 2012, penyaluran kredit relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2011 atau mengalami penurunan. Total penyaluran kredit perbankan pada tahun 2012 mencapai 23,1 persen atau sebesar Rp 507,8 triliun sedangkan pada tahun 2011 penyaluran kredit turun menjadi 24,6 persen atau sebesar Rp 434,3 triliun (Laporan Perekonomian Indonesia Bank Indonesia

Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kredit di sektor konsumsi serta penurunan likuiditas perbankan dan adanya proses revitalisasi kredit yang juga memberikan pengaruh terhadap penurunan penyaluran kredit perbankan pada tahun 2012 ini. Namun, pada awal tahun 2012, KK mengalami penurunan sebesar 4,1 persen dimana KK pada tahun 2011 sebesar 24,1 persen dan KK di tahun 2012 hanya sebesar 20 persen. Penurunan KK ini disebabkan adanya kebijakan *Loan To Value* (LTV) dan *Down Payment* (DP) yang mulai efektif sejak Juni 2012. *LTV* merupakan rasio antara nilai kredit yang diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan aksi spekulasi KPR seperti kredit rumah, apartemen dan tanah. *LTV* ditetapkan maksimal sebesar 80 persen untuk kredit rumah dan 70 persen untuk kredit apartemen dan tanah. Sedangkan DP merupakan rasio antara nilai kredit yang diberikan oleh bank terhadap nilai kendaraan bermotor pada saat awal pemberian kredit. DP ditetapkan sebesar 25 persen dari harga kendaraan bermotor. Kebijakan *LTV* dan DP ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari *bubble* atau penggelembungan harga. Oleh karena itu kebijakan ini termasuk dalam kebijakan makro prudential yang merupakan kebijakan untuk menstabilkan kondisi makro, khususnya pada spekulasi properti dan kendaraan bermotor yang terlalu tinggi. (Laporan Perekonomian Indonesia Bank Indonesia, 2012)

Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah meniamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi

pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih (Laporan Perekonomian Indonesia Bank Indonesia, 2008).

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no 7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan

hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia.

Indikator	Jumlah Kantor Pusat dan Unit Usaha Syariah						
	1998	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah	1	6	11	11	11	11	12
Unit – Unit Syariah	-	25	23	24	24	23	22
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	76	139	150	155	158	163	163

Sumber : Bank Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan syariah berdasarkan laporan BI 2014 (Desember) secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada desember 2014 (berdasarkan data statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 44 unit yang terdiri atas 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah. Selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah telah mencapai 163 unit pada periode

Tabel. 1.2 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)

INDIKATOR	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
ASET	66.090	97.519	145.467	195.018	242.276	272.343
DPK	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	217.858
PEMBIAYAAN	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330
FDR	89,70%	89,67%	88,94%	100%	100,32%	91.50%
NPF	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%
EKUIVALEN	11,40%	10,47%	9,99%	10,72%	11,29%	11,93%

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia 2014

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan terakhir indikasi-indikasi perbankan syariah. Perkembangan asset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2009 sampai dengan akhir 2014 sebesar 12,41 persen. Penghimpunan dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 18,71 persen dan 8,25 persen (Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah).

Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai *Financing to deposito ratio* (FDR). Maka Bank Syariah memiliki rata-rata 93.35 persen. berbeda dengan tahun sebelum dan sesudahnya, pada tahun 2012 dan 2013 *FDR* perbankan syariah lebih dari 100 persen. Tingginya Tingkat *FDR* tersebut karena pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari dan pihak ketiga (Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah).

Yang perlu dicatat disini adalah, meskipun pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari DPK, tetapi tingkat kegagalan bayar atau dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) tahun 2014 yakni hanya sebesar 4.01 persen. masih

dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 persen. Artinya bank syariah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga secara keseluruhan perbankan syariah relatif lebih sehat. Dan tingkat *ekuivalen rate* terendah terjadi pada tahun 2011 dengan 9,99 persen dan yang tertinggi terjadi tahun 2014 dengan 11,93 persen. Walaupun Suku bunga terus meningkat tidak menurunkan minat nasabah untuk melakukan kredit di bank syariah (Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah).

Kredit konsumsi memiliki kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Hal ini membuktikan sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari konsumsi masyarakat. Disisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah suku bunga kredit. Suku bunga kredit merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan kredit konsumsi. Tinggi rendahnya kredit konsumsi ditentukan oleh besar kecilnya suku bunga kredit (Yoga Pradana, 2013).

Saat ini permintaan akan kredit konsumsi relatif tinggi, terutama untuk jenis kredit perumahan dan kendaraan bermotor. Kredit konsumsi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memiliki barang-barang yang diinginkan dengan cara mengangsur, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah. Sehingga banyak kasus perilaku konsumtif tidak didasarkan lagi pada *needed theory*, dimana selalu mengutamakan kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi. Pada kenyataannya, sekarang perilaku konsumtif hanya didasarkan pada rasa keinginan semata dimana gengsi yang menjadi pendorong

utama perilaku konsumtif tersebut. Sehingga tidak mengejutkan jika grafik investasi dan saving selalu bergerak turun dari waktu ke waktu. Selain itu, tidak heran jika kredit konsumsi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memang perilaku konsumtif masyarakat Indonesia tinggi (Yoga Pradana, 2013).

Disisi lain, kredit konsumsi ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena besarnya pangsa kredit konsumsi dapat dikatakan sebagai kredit yang non produktif. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) karena kredit yang disalurkan digunakan untuk konsumsi secara langsung. Selain itu, peningkatan kredit konsumsi disaat krisis perlu diwaspadai karena kemungkinan besar hal ini dapat terjadi ditengah-tengah penurunan daya beli akibat tingginya kebutuhan masyarakat akan konsumsi (Yoga Pradana, 2013).

Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian ini “*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Svariah Di Indonesia (Periode Januari 2012 – Desember 2014)*”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dasar-dasar permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa *Dana Pihak Ketiga (DPK)* berpengaruh terhadap Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah Dana Indonesia periode Januari 2012 - Desember 2014 ?
2. Mengapa *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap Pembiayaan Konsumsi Bank Syariah di Indonesia periode Januari 2012 - Desember 2014 ?
3. Mengapa *Bi Rate* berpengaruh terhadap Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2012 – Desember 2014 ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance, BI Rate* terhadap Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah periode Januari 2012 – Desember 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Dana Pihak Ketiga (DPK)* terhadap Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2012- Desember 2014?
2. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2012- Desember 2014?

3. Mengetahui pengaruh *BI Rate* terhadap Pembiayaan Konsumsi Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2012-Desember 2014?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Merupakan suatu pembelajaran yaitu usaha menganalisa suatu laporan keuangan, dan diharapkan penulis dapat mempraktekan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan suatu masalah.

2. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan Syariah.

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga keuangan syariah dan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu inovasi baru khususnya alokasi pembiayaan di sector usaha kecil dan menengah serta peningkatan kinerja dari Bank Syariah